

Belajar Dari Pengalaman Penerapan Program Bantuan Perumahan Masyarakat Miskin Kota Semarang

Learning From the Experience of Implementation of Poor Housing Assistance Program of Semarang City

Landung Esariti¹

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Abstrak: Pengarusutamaan gender pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2000 melalui Instruksi Presiden No 1 / 2001. Dalam prosesnya, beberapa tindakan afirmatif telah dilakukan untuk mengintegrasikan gender dalam program pengembangan dan perlindungan sosial. Mulai tahun 2008, Gender menjadi salah satu pilar program penanggulangan kemiskinan secara nasional, yang juga telah dilaksanakan di kota Semarang. Pemerintah daerah telah meluncurkan program bantuan perumahan, berupa hibah untuk rumah tangga miskin untuk renovasi rumah dan ditambah dengan bantuan teknis untuk perencanaan lokasi dan bantuan bahan konstruksi. Hasil merekomendasikan persyaratan untuk memahami berbagai karakteristik rumah tangga dan kesadaran pemerintah dan LSM tentang definisi gender. Hal ini juga menyimpulkan bahwa perlu dibuka partisipasi lebih besar dari rumah tangga miskin untuk mendorong lingkup yang lebih luas dari capaian program. Dengan kata lain, adanya pelibatan rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai manifestasi dari pendekatan yang sensitif gender untuk menciptakan keadilan dan keterwakilan dalam kaitannya dengan pelaksanaan program.

Kata kunci: *jenis kelamin; program bantuan perumahan; rumah tangga berpenghasilan rendah.*

Abstract: Gender mainstreaming was first introduced in Indonesia in 2000 through the Presidential Decree No 1 / 2001. In the process, several affirmative actions have been conducted to integrate gender in development and social protection programs. As a result starting in 2008, gender has been mainstreamed to poverty reduction program nationally, which has also been implemented in Semarang city. The local government has launched a housing assistance program, a grant delivered to the low income households for house renovation and supplemented with technical assistance for site planning and construction material decision. The results have suggested the requirement to understand the variety of characteristics of the households and the awareness of the government and NGO staff to gender definition. It is also concluded that to open greater participation from the low income household encourages broader scope of program achievement. This also means inclusiveness of the low income household as a manifestation of gender sensitive approach to create fairness and representativeness in relation to the program implementation.

Keywords: *gender; housing assistance program; low income households.*

¹ Landung Esariti: Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Email: adoeng@gmail.com

Pendahuluan

Sejak tahun 2000, Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender dan Instruksi terbaru dari Departemen Keuangan pada tahun 2011 telah mengintegrasikan gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Hal ini diikuti dengan memilih empat lembaga sebagai *driver* untuk memastikan pendekatan yang sensitif gender dalam pembangunan rencana, yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Gender penting dalam kinerja pelaksanaan berdasarkan capaian keberhasilan dengan maksud untuk mencapai pemerintahan yang baik dan keberlanjutan (Beal (1996) dan Brassard (2009)). Seperti pada praktek tata kelola sebelumnya, pendekatan yang sensitif gender membantu aparat pemerintah untuk menentukan kebutuhan dan kriteria penilaian yang lebih jelas, untuk merancang *roadmap* yang lebih jelas dan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih baik. Pendekatan sensitif gender menempatkan penekanan pada siapa yang akan mendapatkan manfaat dari usaha pengembangan, sehingga menempatkan partisipasi dari masyarakat dan keadilan di pusat perencanaan dan pengembangan.

Makalah ini dibagi menjadi empat bagian; (1) deskripsi metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, (2) gambaran singkat program bantuan yang diberikan, (3) evaluasi dari program bantuan perumahan yang ada berdasarkan pendekatan sensitive gender dan (4) kesimpulan.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan "apa yang faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi pendekatan sensitive gender dalam pelaksanaan Program Bantuan Perumahan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah di Semarang?" Penelitian ini dipicu oleh fakta bahwa program pemerintah nasional untuk pengurangan kemiskinan dan bantuan perumahan masih fokus hanya hasil fisik dan aspek kuantitatif. Selain itu, pendekatan yang banyak digunakan lebih berfokus pada aspek ekonomi daripada yang sosial dan politik yang lebih diperlukan untuk lebih memahami karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah. Penulis mengadopsi konsep bahwa gender berkaitan erat dengan perumahan. Perkembangan kondisi rumah tangga dan perumahan mencerminkan kemampuan rumah tangga yang akan diantisipasi dari kemiskinan.

Gender dipengaruhi oleh budaya, norma, agama / kepercayaan, gaya hidup dan kemajuan teknologi (Gerson (1985), Agarwal (1997), Shrestha (2000), Bartley (2005), Currie Maret (2010)). Gender sentral dalam diskusi, dan masuk penting dalam setiap desain kebijakan / program, khususnya yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan (Unterhalter, 2009). Karakteristik Indonesia sebagai masyarakat heterogen yang terdiri dari lebih dari 200 kelompok budaya yang terletak di 13.466 pulau, berbicara lebih dari 10 (budaya) bahasa, dan memiliki setidaknya 5 agama / keyakinan membuat perlu untuk diselidiki dengan melihat perspektif pendekatan gender untuk mendorong keadilan dan keterwakilan dalam pengembangan konteks.

Melihat karakteristik heterogen, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan apa gender. Pertanyaan-pertanyaan untuk yang diwawancarai kemudian dikembangkan untuk memahami bagaimana berbagai pemangku kepentingan menentukan gender. Yang kedua adalah untuk menganalisis apa jenis kelamin aspek diwujudkan dalam merancang program pengentasan kemiskinan. Kriteria diambil dari penelitian oleh Bastos (2009), yang merekomendasikan beberapa faktor kunci yang berkaitan gender dan program pengentasan kemiskinan. Setelah dilakukan analisis awal, penulis fokus pada tiga aspek yang terkait erat dengan gender dan pengembangan, yaitu:

1. Partisipasi dan suara dengan melihat keberadaan fasilitas untuk komunikasi dan peningkatan kemampuan;
2. Kualitas capaian dengan menyelidiki lingkup jangkauan penerima manfaat;
3. Kapasitas inovasi yang diperkenalkan oleh pemerintah dalam meningkatkan kapasitas administratif untuk melakukan pendekatan kontekstual dan lokal solutif.

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam untuk sekitar 80 orang penduduk, staf perencanaan lokal dan provinsi dan juga pegawai Kementerian terkait.

Analisis Jenis Program Perumahan

Sebuah studi pendahuluan dilakukan pada tahun 2010 oleh tim kerja untuk memilih kecamatan yang sesuai untuk mendapat bantuan perumahan. Menurut penelitian ini, prioritas harus diberikan untuk lima kabupaten di Kota Semarang, yaitu Utara Semarang, Semarang Timur, Genuk Gunungpati, dan Tembalang. Pemilihan itu berdasarkan distribusi geografis, kondisi perumahan dan situasi gender.

Pada lokasi terpilih, tiga jenis bantuan perumahan diterapkan. Tipe pertama disebut BSP2S, Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya. Yang pada awal tahun 2010 program ini fokus pada bantuan teknis yang disediakan untuk renovasi perumahan. Mekanisme program membutuhkan pilihan hati-hati dalam menentukan penerima manfaat, mulai dari proses seleksi melalui *Focus Group Discussion*, yang harus mendapat persetujuan dari staf teknis untuk tahap pelaksanaan dan tahap pemantauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah mencapai target dan mekanisme kontrol atas program itu secara bertahap telah dilaksanakan.

Namun, program ini sangat bergantung pada anggaran dan kemauan politik dari pemerintah nasional. Sehingga mekanisme program cenderung birokratis dan panjang. Tipe ini kaku, terutama ketika calon penerima harus mereka yang terdaftar dalam "Daftar Keluarga Miskin" yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Studi ini juga menemukan bahwa program ini tidak transparan karena penerima manfaat dipilih oleh tim yang bekerja tanpa berkonsultasi dengan penduduk lokal. Setelah calon yang dipilih, tahap berikutnya adalah kolektif diseminasi tentang bagaimana mengalokasikan dana. Di sini, rumah tangga berpenghasilan rendah tidak memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan menerima, menolak, atau menunda program. Selain itu, persyaratan bahwa penerima manfaat harus pemilik tanah yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan kepala rumah tangga menciptakan masalah lain. Ini karena sebagian besar rumah tangga yang berhak memiliki kepemilikan kolektif, bukan satu individu. Mengingat fakta bahwa dana disampaikan secara bertahap, pemerintah daerah telah menyatakan bahwa program tersebut harus memiliki dukungan inisiatif, yang berarti bahwa penerima harus menyediakan modal awal. Itu bisa dalam bentuk uang, rencana desain, bahan rumah, atau sumber daya manusia untuk membangun rumah-rumah.

Jenis kedua dan ketiga adalah program yang ditawarkan oleh *Non-Governmental Organisation* (LSM). Ada kelompok agama dan organisasi masyarakat mandiri, yaitu YKKS, YSS, KopePrum dan BKM Griya Mantra. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada mereka, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi ini membantu pemerintah untuk mengisi kesenjangan antara kebutuhan dan karakteristik penerima dan formalitas program pemerintah itu, sampai batas yang signifikan, tidak dapat diakses oleh orang miskin. Masing-masing dari organisasi memiliki strategi yang berhasil yang sesuai dengan karakteristik masyarakat miskin yang terlibat. Misalnya, YKKS dan YSS (jenis ketiga) membuat program amal untuk menunjukkan kebaikan Komite Gereja untuk membantu orang miskin keluar dari kemiskinan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan skala kecil, memfasilitasi sertifikat tanah kepada tunawisma, pelayanan kesehatan gratis dan lain sebagainya. Di sisi lain, KopePrum (jenis kedua) memberikan uang bantuan untuk membangun atau merenovasi rumah melalui angsuran berdasarkan keterjangkauan masyarakat miskin untuk membayar kembali uang. Strategi yang sama diterapkan oleh organisasi tersebut adalah dengan memberikan lebih banyak waktu untuk kegiatan sosialisasi program karena dianggap penting. Hal ini memenuhi apa yang dimaksudkan oleh program dan apa yang diharapkan dari program ini penerima, yang dapat dalam jangka panjang membuat komunikasi yang efektif yang menentukan pencapaian program. Mereka menggunakan *Focus Group Discussion*, Pemetaan Potensi Desa atau metode *Participatory Rural Appraisal* di proses seleksi penerima manfaat untuk menentukan target yang tepat. penerima ditargetkan. Pada tahap implementasi, YKKS berfokus pada pemenuhan kebutuhan anak, dengan asumsi bahwa ketika kebutuhan anak-anak terpenuhi, kemudian terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga. Program ini disebut Program Sanitasi Lingkungan yang merupakan hibah perbaikan rumah yang didanai oleh donor internasional dan didukung dengan bantuan teknis dari organisasi non-pemerintah berpengalaman dalam perumahan seperti HABITAT Foundation. Sama seperti YKKS,

YSS juga bermitra dengan gereja internasional jaringan, dan bergantung pada bank lahan untuk program perumahan bagi masyarakat miskin. Adapun pelaksanaan oleh KopePrum, dana awal bersumber dari CoBILD (*Community Based Initiatives for Housing and Local Development*, sebuah organisasi nirlaba dengan dana dari UN Habitat), yang kemudian didistribusikan sebagai pemberian pinjaman lunak untuk pembangunan rumah baru. Sementara dalam sistem BKM Griya Mantra, dana berasal dari Bank Dunia melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan disampaikan sebagai hibah untuk renovasi perumahan. Keempat organisasi nonpemerintah (LSM) melaksanakan monitoring dan evaluasi dan belajar dari aplikasi sebelumnya. Pengalaman organisasi 'telah merekomendasikan bahwa setiap program yang mereka buat harus didasarkan pada karakteristik sosial dan budaya dari penerima. Selain itu, mereka juga merekomendasikan untuk fokus pada satu program local yang terarah daripada satu program nasional, tetapi berhenti terus karena masalah dana yang terbatas. Terbukti, tipe kedua dan ketiga lebih berkelanjutan daripada yang pertama terutama karena menawarkan program *incremental* dan lokal tapi menerus dan melibatkan komunitas untuk berpartisipasi sejak dari langkah awal program.

Analisis Pemahaman Pengertian Tentang Pendekatan Sensitif Gender

Tulisan ini meneliti pelaksanaan program bantuan perumahan dengan berfokus pada tiga aspekterkait dengan pendekatan yang sensitif gender. Diskusi pertama berfokus pada tingkat partisipasi oleh *stakeholder* yang terlibat dalam program ini. Tingkat partisipasi dapat distimulasi dengan membuka komunikasi dua cara untukbertukar dan mentransfer pengetahuan dalam stakeholders (Cornwal & Brock (2005), Jauhola (2011)). Partisipasi dapat dilihat dari manifestasi yang berbeda, misalnya kemampuan untuk mengekspresikan ide-ide dalam pertemuan masyarakat, keinginan untuk memberikan dukungan awal seperti yang diminta oleh program, kebebasan untuk menentukan kebutuhan untuk renovasi perumahan proyek, dan lain sebagainya. Partisipasi ini penting untuk membimbing orang-orang miskin untuk mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri dan dapat memutuskan apa yang terbaik bagi mereka. Dengan cara ini, partisipasi mengarah ke pemberdayaan dalam hal negosiasi dan aspek pengendalianmempengaruhi kehidupan mereka (Narayan, 2005).

Setelah belajar bagaimana pemerintah daerah telah menerapkan program ini, jelas bahwa tahap temukan penerima untuk mekanisme monitoring didasarkan pada pendekatan top down. Ini pendekatan top down, ditandai dengan waktu singkat yang tersedia untuk implementasi dan ketergantungan kepada dana pusat dan pengawasan, telah mengakibatkan kurangnya partisipasi dari penerima program. Para penerima hanya berpartisipasi dalam program berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan memiliki pengaruh sedikit mengganggu keputusan. Di sisi lain, kritik dari anggota desa yang tidak dipilih sebagai penerima program telah memaksa pemerintah daerah untuk hati-hati memilih penerima dalam jangka berikutnyapelaksanaan. Situasi ini menunjukkan bahwa ada potensi partisipasi ada di luar program dengan sehubungan dengan akses ke program. Akibatnya, modifikasi mekanisme Program dan seleksi penerima tahap harus difasilitasi dan diharapkan untuk program untuk mencapai lingkup yang lebih luas dari penerima.

Pelaksanaan program bantuan perumahan yang disediakan oleh organisasi non-pemerintah (LSM) telah mencatat partisipasi aktif dari penerima program. Dari prosedur yang sudah dijelaskan, tidak dapat dipungkiri bahwa pertimbangan utama dari pelaksanaan ini adalah untuk memberikan akses informasi bagi masyarakat berpenghasilan sehingga mampu mendefinisikan kebutuhan mereka. Pengalaman menggarisbawahi bahwa dengan diberikan kesempatan, mereka mampu mempertahankan dan terus meningkatkan kondisi rumah mereka bahkan tanpa bantuan dan dari LSM. Kriteria kedua adalah kemampuan untuk bertujuan untuk lingkup yang lebih luas dari penerima manfaat, yang berarti bahwa Pendekatan sensitif gender harus diterapkan dalam program. Kondisi masyarakat berpenghasilan rendah yang terkait dengan profil rumah tangga dapat menjadi berbagai. Misalnya, keberadaan perempuan kepala keluarga, *single* tidak-menikah wanita, dan keluarga tanpa orang tua yang didirikan di lokasi penelitian. Karakteristik pengaruh dari keluarga besar terhadap keluarga inti juga signifikan. Pendekatan oleh LSM yang

fleksibel dan kontekstual menegaskan perlunya dimasukkannya jenis rumah tangga lain, yang tidak termasuk oleh program yang dijalankan oleh pemerintah lokal. Hal ini karena LSM selalu mendorong orang-orang miskin untuk memutuskan kepada siapa bantuan harus diberikan. Dengan kata lain, orang-orang miskin memahami situasi dalam lingkungan mereka lebih baik dan bisa memilih penerima program lebih tepat. Sebaliknya, atas ke bawah pendekatan yang dilakukan oleh otoritas Semarang membuat akses dari kelompok penerima manfaat untuk program terbatas. Pendekatan sensitif gender menegaskan keadilan untuk orang-orang terpinggirkan yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan program. Hal ini membutuhkan kesadaran pemerintah dan staf LSM tentang keberadaan dari berbagai rumah tangga jenis. Artinya, pemahaman relasi gender dalam rumah tangga akan memungkinkan mereka untuk memberikan strategi yang tepat.

Pembahasan terakhir adalah tentang kemampuan dari lembaga untuk meningkatkan kapasitas administrasi untuk menemukan solusi kontekstual dan lokal (Bastos, 2009). Kapasitas ini bisa dalam beberapa modifikasi dari program bantuan perumahan. Salah satunya adalah komunikasi dua arah yang memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah dan staf pemerintah. Kesadaran untuk merancang pelaksanaan yang lebih baik untuk program berikutnya berarti untuk menggabungkan pelajaran dari pelaksanaan sebelumnya. Misalnya, keterlibatan dalam kegiatan ekonomi skala kecil dapat membantu penerima mengurangi kemiskinan serta menciptakan kemandirian untuk melanjutkan perbaikan perumahan kegiatan. Dimasukkannya keadilan sebagai kata kunci untuk pendekatan yang sensitif gender telah menghasilkan tingkat yang lebih besar penerimaan Program daripada penggunaan kata jender yang menghambat lebih banyak perlawanan.

Selain itu, dengan memberikan contoh pada kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi gender maka pelaksanaan Sosialisasi program dapat dengan mudah dipahami dan merangsang partisipasi dari pemangku kepentingan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai pendekatan dalam memfasilitasi karakteristik dari jenis rumah tangga termasuk dalam program menjamin komitmen dari staf pemerintah dan LSM perwakilan untuk keberhasilan program. Ini juga termasuk penciptaan konsep sederhana yang mencerminkan perkembangan di lapangan, orientasi proyek dan kompleksitas masalah, seperti metode analisis jalur gender, metode Harvard, dan metode SWOT.

Kepemimpinan dari kepala lembaga dalam tim kerja telah secara signifikan mempengaruhi tingkat pencapaian program (Haus & Klausen, 2011). Kerja lapangan Catatan tahun 2012 dan 2013 telah tercatat kinerja pemimpin sebagai panutan untuk memberikan contoh dan atau untuk menerapkan praktek-praktek jender, keadilan dan keterwakilan merangsang kesadaran untuk menghargai perbedaan dan untuk mengontekstualisasikan pendekatan yang sesuai dengan kondisi target.

Kesimpulan

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa gender pendekatan sensitif dalam program bantuan perumahan harus diakui oleh sistem perencanaan formal. Ini harus dimulai dengan memiliki pemahaman yang lebih baik dari definisi gender dan apa aspek kontribusi pada pembangunan konsep gender, terutama dalam keluarga berpenghasilan rendah. Lima studi kasus di Gunungpati, Tembalang, Genuk, Semarang Utara dan Timur Semarang di Kota Semarang menunjukkan bahwa partisipasi, inklusi untuk program, kepemimpinan dan kemampuan untuk menciptakan solusi kontekstual adalah faktor kunci dalam pelaksanaannya program bantuan perumahan untuk menjadi lebih efektif.

Penelitian ini mempromosikan pendekatan sensitif gender untuk program implementasi terkait dengan pengurangan kemiskinan sebagai pendekatan yang membantu untuk membuat strategi berdasarkan kondisi lokal dan karakteristik rumah tangga miskin. Lebih penting lagi adalah bahwa strategi ini mendorong inklusivitas dalam orientasi program, mengatur keadilan dan keterwakilan sebagai fokus utama untuk pengukuran capaian program.

Berdasarkan penelitian, pelaksanaan program bantuan perumahan di Kota Semarang, beberapa pelajaran bisa diambil. Pertama, dari perspektif pemerintah,

pemahaman gender dalam lembaga pelaksana memperkuat kompetensi gender dalam rangka untuk merancang kriteria yang lebih jelas untuk penilaian evaluasi dan untuk menentukan *roadmap* lebih jelas dalam proses pembangunan. Selain itu, pelembagaan strategi Pengarusutamaan Gender juga penting untuk mengurangi hilangnya pengetahuan gender dalam lembaga pemerintah untuk memperkuat memori kelembagaan dan manajemen pengetahuan. Dari tingkat masyarakat, perlu digarisbawahi bahwa merancang Pendekatan harus didasarkan pada konteks lokal dan karakteristik rumah tangga berpenghasilan rendah. Pada tahap awal sosialisasi program, harus dilakukan beberapa kali untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang definisi gender karena kata tersebut tidak ada dalam kosa kata bahasa Indonesia. Alih-alih menjelaskan definisi gender yang menyebabkan resistensi, maka lebih efektif untuk mempromosikan gender sebagai bentuk keadilan dalam relasi pria dan wanita, yaitu untuk menampung mereka yang terpinggirkan seperti orang tua, anak-anak, janda, dan orang-orang cacat. Kedua, memberikan contoh pada kegiatan sehari-hari yang mencerminkan konstruksi gender telah membuat program dengan mudah diterima dan didukung oleh pemangku kepentingan. Sebagai tambahan, komunikasi dua arah menjamin partisipasi yang lebih besar dari penerima program. Masyarakat dianjurkan untuk mengusulkan tetangga mereka sebagai penerima program dan untuk bernegosiasi pelaksanaan program berdasarkan pendekatan yang lebih disukai mereka.

Daftar Pustaka

- Adamson, C 2007, 'Gendered anxieties: Islam, women's rights, and moral hierarchy in Java', *Anthropological Quarterly*, vol. 80, no.1, pp.5-37.
- Bastos, A 2009, 'Women and poverty : a gender-sensitive approach', *The Journal Of Socio Economics*, vol.38, pp.764-778.
- Beall, J, 1996. n.d. *Urban governance: why gender matters*. Available from www.citieslocalgovernments.org/.../urbangovernance,whygendermatters. [20 March 2013]
- Beall, J & Todes, A 2004, 'Gender and integrated area development projects: lessons from Cato Manor, Durban', *Cities*, vol.2, no.4, pp.301-310.
- Beard, V. A. 2002, 'Covert planning for social transformation in Indonesia', *Journal of Planning Education and Research*, vol.22, no.1, pp.15-25.
- Brassard, C 2009, 'Measuring aid governance in developing countries: an application to Post-Tsunami Aceh, Indonesia', *International Review of Administrative Sciences*, vol.75 no.4.
- Cornwall, A., & Brock, K 2005, 'What do buzzwords do for development policy? a critical look at 'participation', 'empowerment' and 'poverty reduction'', *Third World Quarterly*, vol.26, no.7, pp.1043-1060.
- Crespin, J 2006, 'Aiding local action: the constraints faced by donor agencies in supporting effective, pro-poor initiatives on the ground', *Environment and Urbanization*, vol.18, no.2, pp.433-449.
- Devika, J, & Thampi, BV 2007, 'Between empowerment and liberation: The Kudumbashree Initiative in Kerala', *Indian Journal of Gender Studies*, vol.14, no.1, pp.33-60.
- Dhanani, S 2002, 'Poverty, vulnerability and social protection in a period of crisis: the case of Indonesia', *World Development*, vol.30, no.7, pp.1211-1231.
- Haus, M, & Erling Klausen, J 2011, 'Urban leadership and community involvement: ingredients for good governance?', *Urban Affairs Review*, vol.47, no.2, pp.256-279.
- Healey, P. 2006. *Collaborative planning: shaping places in fragmented societies* (2nd Ed.), in *Planning, Environment, Cities*, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan.
- Jauhola, M 2011, 'When house becomes home-reading normativity in gender equality advocacy in post-tsunami Aceh, Indonesia', *Gender, Technology and Development*, vol.14, no.2, pp.173-195.
- Ministry of Housing Indonesia 2009, '*Indonesia's housing policies and programs*, Presented on Workshop on Housing Finance in South Asia.
- Minnery, J, Argo, T, Winarso, H, Hau, D, Veneracion, CC, Forbes, D, & Childs, I 2013, 'Slum upgrading and urbanguvernance: case studies in three South East Asian cities', *Habitat International*, vol.39, pp. 162-169.
- Mitlin, D. 2001, 'Housing and urban poverty: a consideration of the criteria of affordability, diversity and inclusion', *Housing Studies*, vol.16, no.4, pp.509-522.
- Moore, J 2000, 'Placing home in context', *Journal of Environmental Psychology*, vol.20, pp. 201-217.
- Moser, CON 1989, 'Gender planning in the third world: meeting practical and strategic gender needs', *World Development*, vol.17, no.11, pp. 1799-1825.
- Muller, A, & Mitlin, D 2007, 'Securing inclusion: strategies for community empowerment and state redistribution', *Environment and Urbanization*, vol.19, no.2, pp. 425-439.
- Narayan, D 2002, *Empowerment and poverty reduction : a sourcebook*. Washington DC, The World Bank.
- Narayan, D, 2005, *Measuring empowerment : cross disciplinary perspectives*, Washington, DC, The World Bank.
- Navarro, L 2001, 'Exploring the environmental and political dimensions of poverty: the cases of the cities of Mardel Plata and Necochea-Quequen', *Environment and Urbanization*, vol.13, no.1, pp.185-199.

- Qibtiyah, A 2010, 'Self-identified feminists among gender activists and scholars at Indonesian Universities', *ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Studies*, vol.3, no.2, pp. 151-174.
- Quick, KS, & Feldman, MS 2011, 'Distinguishing participation and inclusion', *Journal of Planning Education and Research*, vol.31, no.3, pp.272-290.
- Rachmah, I 2001, 'The construction of gender identity in Indonesia: between cultural norms, economic implications, and state formation', *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, vol.14, no.1, pp.21-34.
- Unterhalter, E 2009, 'Gender and poverty reduction: the challenge of intersection', *Agenda: Empowering women for gender equity*, vol.23, no.81, pp.14-24.
- Waal, Mde 2006, 'Evaluating gender mainstreaming in development projects', *Development in Practice*, vol 16, no.2.
- Wieringa, SE 1998, 'Rethinking gender planning: a critical discussion of the use of the concept of gender', *Gender, Technology And Development*, vol.2, no.3, pp. 349-371.
- Arifin dan Nurhayati. 2000. *Pemeliharaan Taman*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Budiharjo dan Sujarto 2005. *Kota Berkelanjutan*. Alumni: Bandung.
- Dermawan, Edy. 2009. *Ruang Publik dalam Arsitektur Kota*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Dermawan, Edy. 2014. *Visual Estetika Taman Arsitektur Kota*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Hakim, Rustam. 2003. *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Laure, Michael. 1984. *Pengantar Kepada Arsitektur Pertamanan*. Intermatra: Bandung.
- Neufert, Ernst. 1996. *Data Arsitek*. Erlangga: Jakarta.
- Pedoman Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (2010).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Shirvani, Hamid. 1985. *The Urban Design Process*. Van Nostrand ReinHold Company: New York.